

## **Pengembangan *E-Government* dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* (Studi pada SMPN 39 Samarinda)**

**Risky Rupang R.T<sup>1</sup>, Bambang Irawan<sup>2</sup>, Santi Rande<sup>3</sup>**

### ***Abstrak***

*Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Pengembangan E-Government dalam PPDB Online di SMPN 39 Samarinda, apakah pelaksanaan dari PPDB Online sebagai wujud pengembangan E-Government sudah sesuai dengan indikator support, capacity, dan value juga untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penghambatnya.*

*Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di SMPN 39 Samarinda. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan, observasi, wawancara, dokumentasi, serta melalui data atau berkas yang diberikan oleh pihak sekolah. Narasumber pada penelitian ada sebanyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari Kepala sekolah, operator, kepala TU, dan masyarakat yang mendaftarkan anaknya untuk bersekolah di SMPN 39 Samarinda. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi data.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengembangan E-Government dalam PPDB Online di SMPN 39 Samarinda pada umumnya sudah berjalan cukup baik. Elemen Support dalam bentuk sosialisasi telah dilaksanakan namun dalam targetnya kepada masyarakat belum terlaksana sepenuhnya. Kemudian jika dilihat dari elemen cappacity belum cukup memadai untuk sumber daya peralatan dan finansial, dalam elemen value dapat dilihat bahwa PPDB Online sudah sangat bermanfaat bagi pihak sekolah maupun masyarakat. Pada Pengembangan E-Government dalam PPDB Online ada beberapa factor penghambat yang mempengaruhinya.*

***Kata Kunci: E-Government, PPDB Online***

### **PENDAHULUAN**

#### ***Latar Belakang***

Perkembangan teknologi era globalisasi saat ini telah menjadi kebutuhan utama yang tidak dapat dilepaskan dari segala aspek kehidupan manusia yang ditandai dengan semakin berkembangnya peradaban manusia lewat media informasi teknologi seperti sekarang. Apalagi jika informasi tersebut disertai dengan kecepatan, ketepatan dan keakuratan informasi yang

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

diterima sehingga hal tersebut telah menjadi tuntutan utama. Pengelolaan sistem informasi yang cepat dan tepat akan sangat membantu suatu instansi pemerintah ataupun swasta dalam mencapai target tujuannya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui *E-Government*. *E-Government* dapat didefinisikan seluruh tindakan dalam sektor publik (baik pusat maupun daerah) yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mengoptimalkan proses pelayanan publik yang efisien, transparan, dan efektif. (Prasojo, et.al., 2007:82). Sejalan dengan hal tersebut pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yang menginstruksikan kepada seluruh pejabat terkait, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *E-government* secara nasional sehingga diharapkan dapat mempermudah penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dengan cepat, tepat, mudah dan sederhana. Pemanfaatan *E-Government* di Indonesia telah diterapkan diberbagai bidang pelayanan publik termasuk dalam bidang pendidikan dimana hal ini sangat berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan karena intensitas kebutuhan pendidikan yang dari masa ke masa semakin meningkat.

Dinas Pendidikan Kota Samarinda yang merupakan institusi pemerintah dalam penerapan sistem informasi Penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* telah merancang Petunjuk Teknis (Juknis) yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan PPDB *Online* di Kota Samarinda pada Tahun Ajaran 2018/2019 dan juga menyelenggarakan SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan) PPDB *Online*, yaitu merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan otomatisasi seleksi penerimaan siswa baru, mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara online dan berbasis waktu nyata (*realtime online*) di setiap sekolah yang menerapkan dengan terlebih dahulu membentuk kepanitiaan khusus (PPDB) *Online*.

Pada SMP Negeri 39 Samarinda dalam pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) *Online* di ini masih ditemukan berbagai kendala, yaitu Tidak adanya sosialisasi pelaksanaan PPDB secara *online* terhadap orangtua siswa dari pihak sekolah secara langsung, minimnya alat penunjang untuk mendukung kelancaran proses PPDB *Online*, serta gangguan sistem *error (server down)* yang disebabkan gangguan jaringan dari pusat saat proses pendaftaran siswa baru mengakibatkan nama SMPN 39 sempat tidak terdaftar di portal SIAP PPDB *online* Samarinda serta terlambatnya pengumuman siswa yang diterima di sekolah tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan di bahas di atas maka hal ini membuktikan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* di SMP Negeri 39 masih mengalami beberapa kendala dalam penerapannya. Untuk itu penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengembangan *E-Government* dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online*” (Studi pada SMPN 39 Samarinda). Dari kondisi pelaksanaan PPDB *Online* di SMPN 39 Samarinda penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana kondisi pemanfaatan serta pengembangan *E-Government* di SMPN 39 Samarinda. Agar kedepannya pelaksanaan program PPDB *Online* dapat mencapai hasil yang baik dalam *mengembangkan E-Government*, khususnya dalam bidang pelayanan pendidikan.

### ***Rumusan Masalah***

Melalui latar belakang yang penulis utarakan dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perumusan masalah di Dinas Pendidikan Kota Samarinda dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengembangan *E-Government* dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) *Online* di SMP Negeri 39 Kota Samarinda ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan *E-Government* dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) *Online* di SMP Negeri 39 Kota Samarinda ?

### **Kerangka Dasar Teori**

#### ***Pengertian Pelayanan Publik***

Menurut Pasolong (2010:128) pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya Monir (dalam Harbani Pasolong2013:128), mengatakan bahwa pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi negara.

#### ***Pengertian Sistem Informasi***

Definisi sistem informasi, menurut Pratama (2014:10) dalam bukunya yaitu sistem informasi merupakan gabungan dari empat bagian utama. Keempat bagian utama tersebut mencakup perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*), infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih. Keempat bagian utama ini saling berkaitan untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Dalam Penerapannya, sebuah sistem informasi dapat berupa sebuah *mainframe*, sebuah *server* dari komputer biasa, maupun hosting di internet pada sebuah komputer *server* yang ketiganya sama-sama menggunakan sarana jaringan komputer (intranet maupun internet) untuk melakukan pemrosesan data secara

bersama (terdistribusi), baik oleh beberapa grup pengguna, menggunakan layanan/fitur/aplikasi yang disertakan.

### ***Pengertian E-Government***

Menurut *World Bank* (dalam Samodra Wibawa 2009:113) *definisi E-Government* yaitu merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti *wide area networks*, internet dan *computer mobile* yang mempunyai kemampuan mentransformasikan hubungan dengan rakyat, kelompok bisnis, aparatur pemerintah

*The World Bank Group* (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), *E-Government* ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Depkomenfo (Samodra Wibawa 2009:114), mendefinisikan *E-Government* adalah pelayanan publik yang diselenggarakan melalui situs pemerintah dimana domain yang digunakan juga menunjukkan domain pemerintah Indonesia yakni (go.id) .

### ***Pengertian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online***

PPDB *online* adalah sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan otomatis seleksi penerimaan peserta didik baru mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara *online* dan berbasis daring dengan menggunakan internet, dan dengan server Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten. Rancangan teknologi PPDB *online* mampu memberikan kemudahan, keamanan dan portabilitas akses secara *online* setiap waktu dan darimana saja (Sholikhah, 2009: 40).

Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu program kegiatan sekolah dan termasuk dalam perencanaan peserta didik dimana Imron (2011: 21) mengemukakan bahwa “perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan di muka tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik akan memasuki sekolah maupun mereka akan lulus dari sekolah”. Perencanaan peserta didik memuat tentang strategi apa yang digunakan, kebijakan yang diambil, program seperti apa yang dilaksanakan, metode apa yang digunakan, tahapan-tahapan yang harus dilakukan, berapa perhitungan biayanya serta menetapkan standar yang dianggap sebagai bentuk keberhasilan.

### ***Definisi Konseptional***

Pada hakikatnya konsep merupakan istilah yang dipergunakan oleh seorang peneliti untuk menggambarkan fenomena yang hendak diteliti. Oleh karena itu perlu didefinisikan secara jelas supaya dapat dimengerti maksudnya. Maka definisi konseptional dari penelitian ini adalah mengenai Pengembangan *E-Government* dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* di SMP

Negeri 39 Samarinda yaitu suatu penilaian dari penerapan PPDB *Online* berdasarkan indikator pengembangan *E-Government* menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government (dalam Indrajit, 2002:15), yaitu sebagai berikut : *support, capacity, value* dalam penerapan PPDB *online* tersebut di SMP Negeri 39 Samarinda.

## **Metode Penelitian**

### ***Jenis Penelitian***

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana yang bersifat deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang deskripsi suatu keadaan secara obyektif. Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi/kejadian-kejadian.

Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.(Sugiyono 2012:8)

### ***Fokus Penelitian***

Dari paparan di atas dan berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian ini yang digunakan penulis untuk mengetahui bagaimana Pengembangan E-Government dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* di SMP Negeri 39 Samarinda menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government* (dalam Indrajit, 2002:15), yaitu :

1. Indikator Pengembangan *E-Government* dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online*, yaitu :
  - a) *Support*, berkaitan dengan *political will* dari pelaksana kebijakan dan penyosialisasian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* kepada masyarakat.
  - b) *Capacity*, berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur teknologi, anggaran dan sumber daya manusia yang memadai.
  - c) *Value*, berkaitan dengan seberapa besar manfaat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *online* dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
2. Faktor penghambat Pengembangan *E-Government* dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* di SMP Negeri 39 Samarinda.

### ***Sumber dan Jenis Data***

Dalam penelitian ini, pemilihan dan pengambilan sumber data dilakukan secara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Dalam proses pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa cara yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan
2. Penelitian Lapangan
  - a. Observasi,
  - b. Wawancara,
  - c. Dokumentasi.

### ***Teknik Analisis Data***

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah alat analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014: 31-33) dimana di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan secara bersamaan yang secara umum ialah: (1) kondensasi data, (2) penyajian data, dan (3) penyimpulan/ verifikasi.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Pengembangan E-Government dalam PPDB online***

Pengembangan *E-Government* dalam *PPDB Online* berhubungan dengan penyedia informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronis, dengan dan oleh pemerintah. Pengembangan *E-Government* dalam *PPDB Online* yang telah diterapkan oleh SMP Negeri 39 mengacu pada Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003, Instruksi Presiden tersebut ditujukan untuk pengembangan *E-government* secara nasional dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*.

Kebijakan tersebut pada akhirnya lahir dan diterapkan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di Kota Samarinda serta mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya bagi masyarakat termasuk dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online*. Berikut ini penulis akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan fokus penelitian yaitu *support, capacity, value*.

### ***Support***

Pada pengembangan *E-Government* dalam *PPDB Online* diperlukan aspek penting yang menjadi salah satu awal dari inisiatif pembangunan *E-*

*Government* untuk dapat mencapai visi misi dari penerapannya tersebut yaitu berupa kebijakan yang telah disepakati oleh pejabat publik yang diselenggarakan secara mudah untuk dapat dipahami, mudah dilaksanakan dan sesuai dengan Petunjuk Teknis PPDB *Online* yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan diatas bahwa SMP Negeri 39 Samarinda yang sebelumnya melaksanakan PPDB secara manual telah melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara *Online* sejak tahun 2017 hingga pada tahun ini. Kebijakan tersebut mendapat dukungan dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda selaku pembuat kebijakan dimana SMPN 39 telah menerima Petunjuk Teknis(Juknis) pelaksanaan PPDB *Online*, selain itu pemerintah juga telah memfasilitasi infrastruktur berupa pembangunan sekolah di tingkat SMP yaitu SMP 46 dan 48 Samarinda dalam rangka mendengarkan permintaan masyarakat dan menambah daya tampung siswa pada PPDB *Online* yang diselenggarakan. Prosedur pelayanan PPDB *Online* di SMPN 39 Samarinda berlangsung baik dan tidak memperumit masyarakat, namun sangat disayangkan sosialisasi tidak terlaksana merata serta tidak adanya papan informasi yang dimiliki oleh SMPN 39 Samarinda yang berkaitan dengan alur pelaksanaan serta persyaratan PPDB *Online*.

### ***Capacity***

Dalam pembangunan dan pengembangan *E-Government* melalui Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) *Online* diperlukan elemen *capacity* yaitu dengan tersedianya sumber daya manusia berkompeten, sumber daya finansial dan sumber daya infrastruktur pendukung agar konsep yang telah diciptakan dapat menjadi kenyataan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di SMPN 39 Samarinda maka dapat diketahui bahwa *capacity* atau ketersediaan dari segi anggaran dan sarana prasarana masih kurang memadai dalam hal kebutuhan pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* bagi masyarakat yang akan mendaftarkan anaknya. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara pihak sekolah dengan masyarakat yang menerima pelayanan, bahwasanya masih terbatasnya komputer dan printer serta ruangan sebagai tempat pelaksanaan PPDB disebabkan anggaran sekolah yang terbatas, di samping itu sekolah juga merasa anggaran untuk pelaksanaan PPDB *Online* cukup memberatkan. Namun, disamping kekurangan tersebut, pihak sekolah tetap berupaya dengan optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPDB online di SMPN 39 Samarinda.

### ***Value***

Elemen value melihat besar tidaknya manfaat yang didapat oleh Dinas Pendidikan selaku pejabat publik yang mengeluarkan Juknis PPDB, pihak sekolah yang memberikan dan melaksanakan pelayanan serta masyarakat yang menerima pelayanan PPDB *Online* di Samarinda.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat diketahui bahwa adanya manfaat yang dirasakan baik oleh pihak sekolah maupun masyarakat secara langsung dan tidak langsung. Dari pihak sekolah mereka dapat merasakan efisiensi waktu dan tenaga serta pengolahan data yang lebih mudah dan akurat, jika dahulu segala sesuatu dilakukan secara manual maka sekarang melalui peralatan teknologi semua dapat teratasi dengan waktu yang singkat. Masyarakat pun juga turut merasakan manfaat dari adanya *E-Government* melalui PPDB *Online* ini ini berupa pelayanan yang lebih singkat dan transparan serta memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan anak mereka di SMPN 39 Samarinda, khususnya bagi siswa yang memiliki orang tua yang bekerja.

### ***Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat dalam PPDB Online di SMPN 39 Samarinda***

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kurangnya dukungan kebijakan pemerintah dalam menerapkan PPDB *Online* masih terbatas dalam hal pembuatan kebijakan PPDB yang persyaratannya terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun atau dapat dikatakan belum konsisten, serta masalah yang cukup penting yaitu minimnya dana disebabkan anggaran PPDB online yang dirasa memberatkan bagi SMPN 39 yang juga secara tidak langsung berdampak pada lambatnya perkembangan fasilitas serta sarana prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran proses selama pelayanan PPDB *Online* di SMPN 39 Samarinda.

### ***Pembahasan Support***

Pada pelaksanaan PPDB di tahun 2019 ini pihak Dinas telah merancang juknis PPDB *Online* dan memberikan arahan kepada setiap kepala sekolah termasuk di SMPN 39 Samarinda yang nantinya diharapkan dapat diteruskan kepada panitia pelaksana PPDB ,kemudian dapat dilaksanakan sosialisasi secara langsung mengenai adanya pelaksanaan *E-Government* kepada para tokoh masyarakat pada setiap pertemuan yang diharapkan dapat disampaikan kepada masyarakat luas. Tetapi dari wawancara yang telah penulis lakukan sebagian masyarakat masih belum mengenal adanya pelaksanaan *E-Government* di SMPN 39 Samarinda. Terlebih dengan adanya portal PPDB *Online*, banyak diantara orangtua siswa yang tidak memahami cara mengaksesnya melalui portal PPDB *Online* beralamat pada <https://siappdb.com> . Komunikasi antara pihak sekolah dan masyarakat masih terdapat miskomunikasi, dimana masyarakat masih belum mendapatkan pemahaman akan alur pelaksanaan PPDB *Online*, hal ini disebabkan oleh banyak faktor, baik dari waktu sosialisasi dari pihak sekolah yang masih kurang, tidak tersampainya sosialisasi tersebut dari para tokoh masyarakat yang diundang, maupun pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam

memperbaharui informasi juga masih rendah, ditambah lagi dengan tidak adanya papan informasi mengenai alur atau proses PPDB *Online* di SMPN 39.

Menurut Indrajit(2002:15), dalam pengembangan *E-Government* dibutuhkan dukungan dari pejabat publik agar konsep *E-Government* dapat diterapkan dan berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *E-Government* dapat terlaksana. Dengan disepakatinya kerangka *E-Government* sebagai salah satu kunci sukses pelaksanaan (Penerimaan Peserta Didik Baru) PPDB *Online* di Kota Samarinda, maka diharapkan pemerintah dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dengan cepat, tepat, mudah melalui dilaksanakannya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online*.

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan bahwa prosedur pelayanan dapat diterima dan dipahami dengan mudah oleh masyarakat sebagai penerima layanan berbasis *online* walaupun dalam hal ini pihak sekolah tidak dapat menyampaikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat secara langsung, namun pihak sekolah tetap mengusahakan pemberian layanan yang baik untuk saat ini dan kedepannya kepada masyarakat.

### **Capacity**

Keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan tidak bisa lepas dari adanya *capacity* yakni sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan yang dapat mendukung proses kelancaran suatu pelaksanaan program. Hal ini menurut Darumurti(2012) menyatakan bahwa “aspek penting yang harus dipersiapkan adalah sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana serta organisasi dan manajemennya.”

*Pertama*, pegawai atau staff, sumberdaya manusia memegang peranan penting dalam menjalankan konsep *E-Government* di SMPN 39 Samarinda. Pegawai yang dimaksudkan ialah pegawai yang mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat secara baik, serta dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan benar dalam hal pelaksanaan PPDB yaitu panitia PPDB yang bertugas melayani masyarakat selama proses PPDB *Online*. Kondisi sumber daya manusia di SMPN 39 Samarinda telah mampu melaksanakan pekerjaannya khususnya dalam penggunaan teknologi dengan baik, serta dapat mengarahkan masyarakat yang pada umumnya masih awam dengan sistem *online* yang telah diterapkan.

Kedua, sumber daya keuangan. Anggaran menjadi faktor pendukung yang penting dalam proses pengembangan *E-Government* dalam PPDB *online*. Untuk dapat melaksanakannya, dibutuhkan anggaran yang cukup besar baik pada tahap persiapan maupun ada tahap pelaksanaan. Anggaran yang ada pada SMPN 39 Samarinda yang ada sangatlah minim untuk membayar anggaran PPDB *online* sejumlah Rp 3.800.000,00 dimana semua sekolah yang melaksanakan PPDB *Online* dikenakan anggaran secara merata tanpa

memandang mampu atau tidaknya kondisi keuangan sekolah tersebut. Hal inilah yang masih menjadi keprihatinan pihak SMP 39 Samarinda dalam menerapkan PPDB *online* dari segi anggaran yang harus dikeluarkan.

Ketiga, faktor pendukung yang lainnya adalah sumber daya peralatan. Suatu program kebijakan tidak dapat berjalan tanpa adanya peralatan yang tersedia. Kondisi peralatan teknologi di SMPN 39 Samarinda dapat dikatakan masih minim. Hal ini terlihat minimnya fasilitas yang ada seperti jumlah printer dan komputer hanya sejumlah satu buah serta kondisi ruangan tempat pelaksanaan PPDB *Online* yang sempit dan panas sehingga kurang mendukung dalam pelaksanaan PPDB di SMPN 39 Samarinda.

Dilihat dari faktor penentu keberhasilan pengembangan *E-Government* pada PPDB *Online* yang ada, maka dapat dianalisis bahwa sumber daya manusia, anggaran serta peralatan memiliki pengaruh terhadap jalannya suatu kebijakan. Sumber daya manusia yang cukup mampu dalam menjalankan kebijakan tidak diimbangi dengan tersedianya anggaran dan sarana prasarana yang memadai serta jumlah sumber daya manusia yang perlu ditambah.

### **Value**

Pelaksanaan suatu kebijakan tidak terlepas dari nilai atau besaran manfaat yang didapat, kebijakan *E-Government* tentu akan memiliki manfaat yang akan diperoleh masyarakat sebagai penerima layanan dan petugas sebagai pelaksana. Hakikat keberadaan pemerintah yaitu untuk memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Dalam hal pelayanan tidak bicara mengenai kuantitas melainkan juga kualitas yang diberikan. Untuk itu layanan yang akan diberikan harus mendukung pemberian layanan kepada masyarakat yang berkualitas, yaitu cepat, mudah, dan praktis, dengan mengandalkan teknologi atau yang dikenal *dengan E-Government*. Salah satu manfaat sistem *online* adalah terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan publik terkhusus dengan diterapkannya *E-Government* dalam bidang pendidikan dengan rancangan teknologi PPDB *Online* yang mampu memberikan kemudahan, keamanan dan portabilitas akses secara *online* setiap waktu (Sholikhah, 2009:40).

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui beberapa masyarakat belum memahami akan pelaksanaan PPDB secara *online* di SMPN 39 dikarenakan belum menerima sosialisasi yang diadakan yang akan disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang diundang oleh pihak sekolah ditambah lagi tidak adanya papan informasi alur PPDB *online* di SMPN 39, sehingga petugas PPDB harus mengarahkan kembali serta ada beberapa masyarakat yang tidak membawa berkas lengkap. Hal ini juga menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat masih dalam memperbaiki informasi menggunakan teknologi dan juga pihak sekolah yang masih kurang merata dalam hal penyebaran sosialisasi kebijakan pelayanan berbasis *online*. Namun disamping itu manfaat dari PPDB *online* banyak dirasakan disetiap kalangan dimana sistem PPDB *online* telah memudahkan masyarakat dalam proses

pendaftaran siswa baru yang dapat diakses melalui portal PPDB yang dapat diakses secara umum, pihak sekolah pun dapat menjalankan proses pelayanan dengan lebih efisien dan efektif memanfaatkan teknologi yang ada dan pihak dinas dimudahkan dalam memantau hal-hal yang terjadi dalam proses PPDB secara *online* .

### ***Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat Dalam Pengembangan E-Government dalam PPDB Online***

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis, maka didapati untuk anggaran PPDB *Online* SMPN 39 di tahun 2019 ini masih sangat terbatas dengan kondisi sekolah saat ini, sehingga dari pihak sekolah telah mengajukan keringanan namun belum ada tindakan ataupun keringanan dari pemerintah sehingga hal ini juga dirasa berpengaruh terhadap terhambatnya penyediaan sarana dan prasarana seperti jumlah printer dan komputer tetap sekolah masing-masing hanya satu buah walaupun sementara dapat diatasi dengan penggunaan laptop pribadi dari panitia PPDB *Online* yang bertugas, serta kendala lainnya yaitu ruangan yang sempit dan pengap yang cukup menghambat proses PPDB *Online* di SMPN 39 Samarinda.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan penulis berdasarkan tujuan penelitian dan fokus penelitian yang ada menunjukkan bahwa Pengembangan *E-Government* dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* di SMPN 39 Samarinda, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengembangan *E-Government* dalam PPDB *Online* di SMPN 39 Samarinda sudah berjalan cukup baik sebab sudah dapat membantu masyarakat dalam hal pelayanan publik yang cepat dan berkualitas untuk mendaftarkan siswa baru secara *online*. Namun, berdasarkan indikator pengembangan *e-government*, dari indikator *support*, *capacity*, dan *value* diketahui masih mengalami berbagai hambatan.
  - a. Pada indikator *support* menunjukkan bahwa sosialisasi secara umum kepada masyarakat tidak sepenuhnya dilakukan karena hanya melalui tokoh masyarakat yang diundang saja sehingga kebanyakan masyarakat yang belum paham akan sistem yang diberlakukan ditambah lagi belum adanya papan informasi mengenai prosedur pelayanan PPDB *Online* yang diletakkan di tempat yang strategis menyulitkan masyarakat sehingga pelayanan PPDB berbasis *online* dan *website* yang tersedia masih kurang diketahui oleh masyarakat luas. Dari sisi operator yang melaksanakan juga merasakan bahwa sistem PPDB *Online* masih belum konsisten dikarenakan perubahan yang terjadi setiap tahun.

- b. Indikator *capacity* atau sumberdaya di SMPN 39 dalam hal sumber daya finansial dan peralatan SMPN 39 masih mengalami kesulitan padahal hal tersebut merupakan kunci keberhasilan dari dilaksanakannya Pengembangan *E-Government*. Hal ini dapat terlihat bahwa masih minimnya sumberdaya peralatan penunjang PPDB Online seperti komputer dan *printer*. Di sisi lain anggaran yang dimiliki juga sangatlah terbatas untuk dapat mengikuti PPDB Online. Namun, dari keterbatasan tersebut, panitia PPDB di SMPN 39 Samarinda tetap berusaha mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
  - c. Pada indikator *Value* atau manfaat yang akan diperoleh masyarakat sebagai penerima layanan dan pihak sekolah sebagai pemberi layanan PPDB *Online* dengan ditunjukkan bahwa kurangnya fungsi sarana penyebaran informasi mengenai PPDB Online kepada masyarakat menyebabkan keterbukaan informasi pelayanan sebagian besar masih bersifat tertutup. Namun nilai manfaat yang didapat dengan adanya pelayanan PPDB secara *online* yakni, lebih efisien secara waktu, dan tenaga sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan PPDB Online di SMPN 39 Samarinda.
2. Faktor penghambat PPDB *Online* di SMPN 39 Samarinda antara lain terbatasnya keterbatasan peralatan penunjang pelayanan publik disebabkan anggaran yang minim dimiliki sekolah karena besarnya jumlah yang harus dibayarkan untuk mengikuti PPDB *Online*, kurangnya sosialisasi mengenai PPDB *Online* kepada masyarakat umum yang seharusnya masyarakat harus mengetahui sebab masyarakat juga mempunyai andil yang besar dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta tidak tersedianya papan informasi mengenai alur dan persyaratan PPDB *Online* yang menyebabkan semakin minimnya pengetahuan masyarakat akan pelaksanaannya di SMPN 39 Samarinda.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang mungkin dapat berguna bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Sebaiknya bagi kepala sekolah dan seluruh pihak SMPN 39 Samarinda lebih meningkatkan interaksi, komunikasi dan relasi dengan masyarakat dari jauh-jauh hari sebelum hari melakukan sosialisasi PPDB *Online*, sehingga informasi dapat tersampaikan secara utuh kepada masyarakat agar pelaksanaan PPDB *online* tidak mengalami hambatan dimana seringkali masyarakat tidak paham dengan sistem *online* yang berlaku dan tidak membawa kelengkapan berkas yang menyulitkan pihak sekolah.

2. Terbatasnya sumber daya peralatan. Sebaiknya pihak sekolah menyicil untuk memenuhi segala kebutuhan akan sumber daya peralatan yang belum terpenuhi di SMPN 39 Samarinda untuk kedepannya, dimana masih kurangnya printer dan komputer tetap yang digunakan menjadi suatu permasalahan penting kedepannya jika tidak dipenuhi serta perlu adanya perluasan ruangan PPDB *Online* dikarenakan ruangnya sangat sempit dan pengap untuk pelaksanaan PPDB *Online* yang telah direncanakan oleh pihak sekolah sehingga prosesnya dapat berjalan lancar dan meminimalisir hambatan yang ada.
3. Manfaat yang dirasakan masyarakat sudah terasa dengan hadirnya PPDB *online*, namun masih terdapat hambatan yang terjadi pada proses pelayanan, yaitu belum adanya papan informasi persyaratan pelayanan. Sebaiknya pihak SMPN 39 Samarinda juga perlu menyediakan papan informasi prosedur pelayanan yang diletakkan di tempat yang strategis yaitu di depan sekolah sehingga dapat dilihat oleh masyarakat agar tidak menyulitkan masyarakat serta pihak sekolah lagi dikarenakan masyarakat tidak memperoleh informasi mengenai PPDB *Online* secara jelas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Arifianto, S. 2013. *Dinamika Perkembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Implikasinya di Masyarakat*. Jakarta:Media Bangsa.
- Hardiyansyah.2011. *Kualitas Pelayanan Publik*.Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Imron, A. 2014. *Proses Manajemen Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Electronic Government, Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta:Andi.
- Meleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Pasolong Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Pratama, I Putu Agus Eka. 2014.*Sistem Informasi dan Implementasinya*. Bandung:Informatika Bandung.
- Puspitasari, N.A. 2014. *Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMA Negeri Berbasis Online Di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten*. (Skripsi).